



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 14137-14145

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SDN 16 Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

Santi Akili<sup>1✉</sup>, Lisda Van Gobel<sup>2</sup>, Tety Thalib<sup>3</sup>

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: [santi.akili@gmail.com](mailto:santi.akili@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 16 Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder, dan teknik analisis data yang digunakan adalah : reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dilihat dari aspek pemahaman mengenai pemanfaatan KIP masih sangat rendah, di karenakan orang tua yang tidak mengetahui peruntukan dari kartu indonesia pintar (KIP) tersebut. Dari segi pemanfaatannya masih kurang termanfaatkan, hal ini dikarenakan masih banyak orang tua siswa menggunakan bantuan KIP tersebut tidak berdasarkan petunjuk teknisnya, dari segi distribusi belum tepat sasaran di karenakan kurangnya keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaannya sesuai juknis.

Kata Kunci: *Implementasi, Program, Kartu Indonesia Pintar*

### Abstract

This research aims to determine the implementation of the Smart Indonesia Card (KIP) Program at SDN 16, Tibawa District, Gorontalo Regency. This research uses a qualitative descriptive research type. The data collection techniques used are: Observation techniques, interviews and secondary data recording, and the data analysis techniques used are: data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the research show that: from the aspect of understanding regarding the use of KIP, it is still very low, because parents do not know the purpose of the Indonesian Smart Card (KIP). In terms of utilization, it is still underutilized, this is because many parents of students use KIP assistance not based on the technical instructions, in terms of distribution it is not yet on target due to the lack of public involvement in monitoring its use according to technical guidelines.

Keywords: *Implementation, Program, Smart Indonesia Card*

## PENDAHULUAN

Pendidikan berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju ke arah yang lebih baik. Olehnya, pelaksanaan pendidikan perlu mendapatkan dorongan dari semua pihak agar dalam pelaksanaannya pendidikan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Pendidikan merupakan pemotong mata rantai kemiskinan, melalui pendidikan yang mencukupi, seseorang dapat hidup dengan layak seperti yang diharapkan

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan, yang berupaya keras di galakkan dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan. Kartu Indonesia Pintar (KIP), merupakan salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sebagai bentuk perwujudan Nawacita ke-5 dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pemerintah menggalakkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan. Program tersebut diluncurkan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

Kartu Indonesia Pintar adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin memberikan buah hatinya pendidikan yang layak tanpa dipungut biaya, berdasarkan usia anak yang ditanggung. Implementasi KIP di antaranya adalah digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-18 tahun) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus. Hal ini untuk mendorong pengikutsertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah, dan untuk dapat meringankan biaya personal sang anak dalam menempuh pendidikan di sekolah, seperti membeli seragam, buku pelajaran dan buku tulis, dan perlengkapan pendidikan lainnya.

Kabupaten Gorontalo berupaya memajukan program pengembangan pembangunan daerah, khususnya ditujukan pada perluasan program penguatan pendidikan berkarakter bukan hanya di sekolah-sekolah rintisan yang ditunjuk oleh Kemendikbud tetapi seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dalam implikasinya, setiap satuan lembaga pendidikan formal yang berada di setiap wilayah kecamatan dianjurkan untuk turut aktif dan optimis terhadap program pembangunan sumber daya manusia kompetitif melalui partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan ketercapaian KIP sebagai salah satu program pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, belum sepenuhnya tercapai dengan optimal. Intinya bahwa program KIP ini perlu dievaluasi secara berkala karena ditemui beberapa kesenjangan antara pelaksanaan dan desainnya. Temuan-temuan tersebut pada kenyataannya berbeda persoalan sesuai dengan dengan kondisi di wilayahnya, melalui hasil pengamatan sementara, atau studi lapangan pada tahap awal, penulis menemukan bahwa masih banyak ketimpangan yang terjadi di lapangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan.

Hal ini tentunya menimbulkan kesenjangan antara sasaran kebijakan KIP dengan kondisi nyata di lapangan. Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 16 Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, diberikan dalam bentuk kartu ATM dengan persyaratan tertentu untuk bisa memilikinya. Siswa yang didaftarkan memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) yang tersinkronisasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) orang tuanya, kemudian diusulkan oleh pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan/Kementerian Agama kabupaten/kota melalui data/rekapitulasi yang diaplikasikan langsung ke data pokok pendidikan (dapodik).

Adapun jumlah yang diterima peserta didik SD (siswa) masing-masing sebesar Rp.225.000,00 tiap semester atau Rp.450.000,00 per tahun, dengan jumlah penerima 19 orang siswa setiap kelasnya, kelas satu sampai kelas enam, dengan total keseluruhan penerima manfaat adalah 115 siswa setiap tahunnya. Observasi awal yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa fenomena yang ditemui terkait Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 16 Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Pertama, kurangnya pemahaman orang tua didik dalam mengelola dan menggunakan KIP dengan baik. Artinya, sebagian orang tua siswa yang menerima bantuan KIP biasanya lebih dulu membelanjakannya untuk keperluan harian atau kebutuhan pokok keluarga (beras, lauk, dan rempah-rempah). Sisanya digunakan untuk belanja kebutuhan sekolah (sepatu, buku, tas, dll).

Kedua, adanya penggunaan dan pemanfaatan KIP yang tidak sesuai peruntukannya. Artinya, dana KIP yang khususkan untuk pendidikan sekolah, seperti pembelian buku dan alat tulis sekolah, seragam, transportasi dan lain-lain tetapi digunakan untuk keperluan lainnya seperti membeli pakaian santai, jajan anak, dan keperluan rumah tangga lainnya.

Ketiga, adanya pendistribusian penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak merata. Penerima KIP yang dibagikan tidak sesuai lagi dengan nama yang diusulkan sebelumnya, padahal pihak sekolah sudah mendaftarkan sebanyak 245 siswa dari

keseluruhan yang diusulkan namun realisasi jumlah siswa yang menerima program KIP hanya sebanyak 115 siswa.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 16 Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, melalui permasalahan yang terjadi dan menggambarkan keadaan yang tampak, dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, serta alternatif solusinya.

#### Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang dinamis, setiap saat senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban dan teknologi. Definisi administrasi publik menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus dalam (Saefullah 2014:13) yaitu; (1) implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan - badan perwakilan politik. (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. (3) Secara global adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan - kebijakan pemerintah. (Rosenbloom 2015:32) Melihat administrasi publik sebagai *"the work of government"* atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah. (Abdul Rahman 2015:38) administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. (Rosenbloom 2015:32) Melihat administrasi publik sebagai *"the work of government"* atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Dalam definisi ini lebih menekankan aspek keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Adapun definisi administrasi publik menurut (Kencana 2015:36) adalah: (1) kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan. (2) eksekutif, legislatif dan yudikatif. (3) peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah. (4) berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan (5) berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan public.

#### Kebijakan

Menurut Fredrich dalam (Agustino 2017:166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan atau kesulitan dan berbagai kemungkinan dimana kebijakan tersebut di usulkan agar dapat mengatasi ataupun mencapai tujuan yang

dimaksud. Batasan tentang kebijakan publik menurut (Syahrudin 2019:7) yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan".

Sementara itu, Anderson dalam (Agustino 2017:167) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh (Winarno 2017:55) mengemukakan tentang kajian kebijakan publik semakin meningkat namun masih relative sedikit yang memahaminya prosesnya, keadaan tersebut berdampak negatif dalam dua hal pertama, menjadi satu kekurangan yang kurang menguntungkan dalam memahami prosesnya kedua, mendorong terciptanya suatu peluang menyatakan saran yang kurang baik, tidak dipahami oleh para pembuat kebijakan sehingga mengakibatkan kegagalan kebijakan yang diambil.

Menurut (Dunn 2013:132) salah satu ciri dari tiga elemen sistem kebijakan yang saling berpengaruh satu sama lainnya adalah pelaku kebijakan (policy stakeholder) para individu yang mempunyai andil dalam kebijakan karena dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.

#### Implementasi

Seorang Pakar kebijakan asal Afrika, Udoji dalam (Solichin Abdul Wahab 2017:133) dengan ketegasan mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri. selanjutnya Van Meter Van Horn dalam (S Abdul Wahab 2017:135) merumuskan proses implementasi adalah sebagai bentuk tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok –kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan tersebut.

#### Program KIP

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan. Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Direktorat jenderal, Diknas Provinsi, Diknas Kabupaten/Kota, serta Satuan Pendidikan lainnya. Melalui Kemendikbud maka disediakanlah Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), adapun pembiayaan pencetakan KIP, di bebaskan pada anggaran Direktorat jendral terkait sesuai

dengan kuota nasional masing-masing.

Pemberian bantuan kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah, bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak yang rawan putus agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa diluar biaya operasional sekolah, biaya transportasi, uang saku dan lain-lain.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sukmadinata 2017:58), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Pendekatan deskriptif berusaha mendeskripsikan keseluruhan gejala atau keadaan apa adanya yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar 2013:111).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono 2017:102). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh fakta-fakta terhadap suatu masalah yang diteliti melalui data-data yang dikumpulkan untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat. Keseluruhan proses ini berlangsung pada saat penelitian dimana analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemahaman

Pemahaman dalam penelitian ini mencakup ketidakmampuan orang tua siswa dalam memahami dan memanfaatkan program KIP sesuai dengan petunjuk. Sejak hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Kartu Indonesia Pintar sangat bergantung pada pemahaman dan dukungan orang tua serta pendampingan yang diberikan oleh pihak sekolah. Perlu ada upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mendukung pendidikan anak-anak.

Hasil wawancara bersama para informan, menyebutkan bahwa informan menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat kurang memahami kebijakan maupun mekanisme penyaluran dana bantuan PIP sehingga mereka menggunakan KIP tidak sesuai petunjuk teknisnya. Ketidaktahuan mereka sebagai orang tua yang menerima bantuan program KIP sehingga dengan sengaja membelanjakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan mereka ketimbang kebutuhan anaknya. Akan tetapi berbeda pernyataan dengan informan yang menyatakan bahwa walaupun memang benar hampir semua membelanjakan bantuan program KIP tersebut untuk kebutuhan rumah hal namun masih ada juga masyarakat yang tidak menggunakan untuk keperluan lain tetapi lebih kepada kebutuhan anak sendiri olehnya, Alternatif solusi yang diberikan merupakan jalan keluar untuk mendorong adanya keterlibatan semua pihak untuk bekerjasama saling memantau dan mengevaluasi pelaksanaan KIP secara menyeluruh dan seimbang.

## Penggunaan dan Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah proses penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks KIP, dana yang diberikan oleh pemerintah harus digunakan secara efektif untuk mendukung pendidikan anak. Jika dana ini digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak berhubungan dengan pendidikan, maka tujuan dari program KIP tidak akan tercapai secara optimal. Hasil penelitian bahwa ada orang tua yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menyadari tujuan dari program KIP. Oleh karena itu, selain sosialisasi, diperlukan juga mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa dana KIP digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dukungan dari pihak sekolah dalam bentuk edukasi dan pendampingan kepada orang tua juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Hasil wawancara bersama para informan, menyebutkan bahwa informan menyatakan bahwa sebagian besar tidak menggunakan ataupun memanfaatkan bantuan program KIP dengan benar tetapi masih ada beberapa orang tua yang menggunakannya sesuai petunjuk teknisnya.

## Pendistribusian

Pendistribusian merupakan salah satu bagian dari pemasaran, diartikan kegiatan membagikan sesuatu terhadap orang lain sesuai dengan yang apa yang diperlukan. Distribusi dalam penelitian ini adalah adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran membagikan, menyalurkan, menyebarkan KIP kepada siswa yang mendapatkan program KIP tersebut. *Hasil penelitian* bahwa terkait pendistribusian masih perlu perbaikan dan pembenahan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut: a) Pemahaman orang tua siswa mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih rendah. Banyak orang tua yang belum memahami bahwa dana KIP seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan siswa seperti pembelian seragam, buku, dan alat tulis. Hal ini menyebabkan sebagian besar dana KIP digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang lain. b) Penggunaan dana KIP oleh orang tua siswa sering kali tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan seringkali dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tujuan utama dari program KIP tidak tercapai secara optimal. c) Distribusi dana KIP di SDN 16 Kecamatan Tibawa tidak merata dan tidak sesuai dengan jumlah siswa yang diusulkan oleh pihak sekolah. Dari 245 siswa yang diusulkan, hanya 115 siswa yang menerima dana KIP. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pendistribusian dana KIP yang perlu segera diatasi. d) Sosialisasi dan pendampingan kepada orang tua mengenai penggunaan dana KIP masih sangat kurang. Diperlukan upaya yang lebih intensif dari pihak sekolah dan pemerintah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada orang tua siswa mengenai tujuan dan penggunaan dana KIP yang benar

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas program KIP di SDN 16 Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ialah: a) Pemerintah dan pihak sekolah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai program KIP kepada orang tua siswa. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pertemuan orang tua, brosur, dan media sosial. b) Diperlukan pendampingan yang lebih intensif kepada orang tua siswa dalam mengelola dan memanfaatkan dana KIP. Pihak sekolah dapat mengadakan pelatihan atau workshop untuk orang tua mengenai penggunaan dana KIP yang benar. c) Pemerintah dan pihak sekolah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana KIP oleh orang tua siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan rutin dan audit terhadap penggunaan dana KIP. d) Program KIP perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui

efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan program di masa mendatang.

#### Penelitian Lanjutan

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 16 Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, masih diperlukan penelitian-penelitian lanjutan baik bersifat pengembangan maupun kedalamannya. Oleh karena itu, disampaikan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 1) Perlu adanya penelitian mengenai Evaluasi pada program kartu indonesia pintar agar tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari sehingga implemetasi KIP dapat berjalan lebih optimal 2) Jika melakukan studi statistik dengan data kuantitatif, maka disarankan melakukan update data dan informasi mengenai variabel-variabel yang akan digunakan 3) Penelitian ini hanya menggunakan penelitian kualitatif untuk itu perlu di lakukan peneitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berbeda dengan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2015. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan. Jakarta CV Haji Mas Agung.
- Abdul Wahab, S. 2017. "Analisis Implementasi Kebijakan Publik."
- Abdul Wahab, Solichin. 2017. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Dunn, W. N. 2013. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Prentice Hall.
- Kencana, Syafie Inu. 2015. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: GP Press.
- Rosenbloom, D. H. 2015. Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the Public Sector. New York: McGraw-Hill.
- Saefullah. 2014. Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan. CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja.
- Syahrudin. 2019. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Studi Kasus. Bandung: Nusa Media.
- Winarno, Budi. 2017. Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Yogyakarta: Media. Pressindo.